

BAB 8

ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Setiap usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya. Bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh adalah aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pembaca dapat memahami dan menjelaskan analisis ekonomi dibanding dengan analisis keuangan, analisis biaya serta manfaat ekonomi dan sosial. Disamping itu pula pembaca dapat menghitung kriteria investasi tambahan yang diperlukan bagi proyek-proyek tertentu.

C. MATERI

Dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah adalah adakah manfaat yang akan diperoleh baik secara ekonomi maupun sosial bagi berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu di pertimbangkan karena

dampak yang ditimbulkan nantinya akan sangat luas apabila perusahaan/investor salah dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu proyek.

Materi-materi dalam bab ini sebagai berikut:

1. Analisis Ekonomi dan Keuangan
2. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial
3. Manfaat Ekonomi dan Sosial
4. Konsep Surplus Konsumen dan Surplus Produsen
5. Konsep Harga Bayangan
6. Harga Bayangan dari Faktor Produksi / Sumber Daya
7. Kriteria Investasi Tambahan / Konsep Unit Domestic Resource Cost (UDRC).

PEMBAHASAN MATERI

C.1. Analisis Ekonomi Dan Analisis Keuangan

Analisa Keuangan menitik beratkan pada pendekatan mikro, hanya membatasi pada manfaat dan pengorbanan dari segi perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha tersebut. Hasil analisa ini disebut juga sebagai *the private return* dan analisisnya sering disebut sebagai analisa komersil. Usaha atau proyek yang dilakukan oleh pihak swasta pada umumnya cukup hanya dianalisa secara keuangan saja.

Analisa Ekonomi menitik beratkan pada pendekatan makro, dengan melihat kegiatan usaha dari segi perekonomian secara keseluruhan dengan mengidentifikasikan manfaat dan pengorbanan suatu kegiatan usaha terhadap masyarakat umumnya. Hasilnya disebut sebagai *the economic return*. Usaha /proyek skala besar atau yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya selain analisa keuangan juga diperlukan analisa ekonomi.

Pendekatan kedua analisa ini berbeda sehingga nantinya hasil perhitungannya juga berbeda,oleh karena itu ada beberapa alasan yang mendorong dilakukannya analisa ekonomi, yaitu adalah:

1. Ketidak sempurnaan Pasar berupa distorsi pasar yang disebabkan oleh tindakan-tindakan seperti proteksi baik yang bersifat hambatan tariff maupun yang non tariff, pengendalian harga, kedudukan monopoli, peraturan-peraturan pemerintah.
2. Adanya pajak dan subsidi dimana pajak merupakan pendistribusian sebagian kekayaan dari konsumen (pajak penjualan) dan dari produsen (pajak perusahaan) ke pemerintah.
3. Berlakunya konsep surplus konsumen dan surplus produsen yang berhubungan dengan permintaan (demand) dan penawaran (supply), dimana pada saat terjadi penambahan penawaran karena adanya suatu proyek maka kemungkinan juga terjadi penurunan harga, sehingga konsumen mendapat keuntungan dengan adanya harga yang lebih rendah.

C.2. Analisis Biaya Dan Manfaat Sosial

Analisis biaya dan manfaat social akan dilakukan analisisnya dengan menambahkan ;

1. Masalah externalitas
2. Pendistribusian penghasilan yang lebih merata
3. Peningkatan saving yang akan meningkatkan investasi
4. dll.

Penentuan biaya ekonomi relatif lebih mudah dibandingkan dengan manfaat ekonominya, hanya saja masalah pokok yang sering timbul adalah penyesuaian actual cost yang berdasarkan harga bayangan (shadow price), dan kadang-kadang penyesuaian jenis-jenis biaya yang ada dalam analisa aspek ekonomi tidak lagi tergolong dalam biaya.

Jenis-jenis biaya ekonomi yang perlu mendapatkan penyesuaian berdasarkan konsep harga bayangan, antara lain adalah ;

1. Biaya Bunga

Biaya bunga yang dikeluarkan oleh suatu proyek sering tidak menggambarkan suku bunga riilnya bagi biaya finansial, sehingga diperlukan penyesuaian.

2. Upah

Biaya upah untuk negara-negara sedang berkembang belumlah mencerminkan upah yang riil. Misalkan, untuk tenaga kerja yang ahli serta terdidik cenderung terlalu murah sehingga untuk tenaga kerja yang tidak terdidik / tidak terampil cenderung dibayar tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.

3. Devisa

Untuk setiap biaya yang timbul karena pemakaian devisa perlu dilakukan penyesuaian. Umumnya ada 2 golongan / macam yang memerlukan penyesuaian yaitu, komponen-komponen proyek yang diimpor dari luar negeri dan komponen-komponen dalam negeri akan tetapi memakai devisa.

C.3. Manfaat Ekonomi Dan Sosial

Untuk mengukur manfaat ekonomi bagi suatu proyek akan cenderung lebih sulit dibandingkan dengan mengukur biaya ekonomi. Hal ini disebabkan manfaat ekonomi yang diterima secara langsung berupa output proyek yang tidak dapat diukur dengan satuan moneter dan didalamnya juga terdapat manfaat sekunder dan manfaat intangible (tak nyata) yang sulit diukur dengan satuan moneter (kuantitatif). Pengukuran manfaat ekonomi yang utama (primer) yaitu, berupa output utama dan penentuan manfaatnya dilakukan dengan penghasilan devisa sehingga dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian menggunakan harga bayangan (shadow price).

Ada beberapa manfaat sekunder dari suatu proyek tertentu yang kadang-kadang sulit diukur, antara lain sebagai berikut;

1. Kenaikan tingkat konsumsi
2. Membantu prose pemerataan pendapatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

4. Mengurangi ketergantungan kepada negara lain
5. Mengurangi pengangguran, dan
6. Manfaat sosial budaya, dll.

Didalam beberapa manfaat diatas apabila suatu proyek lebih menekankan efek sosial dan distribusi, maka manfaat tersebut sebaiknya dinyatakan dalam satuan ukuran yang jelas, kecuali apabila proyek tersebut menekankan pada aspek finansial.

C.4. Aspek Ekonomi

Data makro ekonomi banyak dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka SKB, PDB (produk domestik bruto) investasi, inflasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, pengeluaran pembangunan, perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.

Selain menjadikan fakta makro ekonomi sebagai input dalam SKB, hendaknya perlu dikaji imbal baliknya, yaitu bahwa bisnis yang direncanakan hendaknya bermanfaat bagi pihak lain.

Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi yaitu:

1. Sisi rencana pembangunan nasional
Analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini, dimaksudkan agar proyek dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat
 - b. Menggunakan sumber daya lokal
 - c. Menghasilkan dan menghemat devisa
 - d. Menumbuhkan industri lain
 - e. Turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan
 - f. Menambah pendapatan nasional
2. Sisi distribusi nilai tambah
Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambahan hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut agar lebih

mudah, dapat diasumsikan bahwa proyek memproduksi dengan kapasitas normal setelah nilai tambah diketahui besarnya, nilai ini selanjutnya dapat didistribusikan, hendaknya, perhitungan-perhitungan yang dilakukan jelas.

3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja

Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau pada karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap + modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja untuk proyek perluasan, perhitungan nilai investasi merupakan jumlah investasi sebelum dan sesudah investasi.

4. Hambatan di bidang ekonomi

Pelaksanaan pengembangan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Bagi Indonesia, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang juga akan berdampak pada aspek sosial dan politik.

Beberapa penghambat pembangunan itu antara lain seperti tertera di bawah ini:

- a. Iklim tropis, menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia, banyak muncul penyakit, serta membuat pertanian kurang menguntungkan.
- b. Produktivitas rendah, ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang relatif kurang menguntungkan.
- c. Kapital sedikit, ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah.

- d. Nilai peradangan luar negeri yang rendah, ini disebabkan negara miskin mengAMDALkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastic. Hal ini dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerugian.
 - e. Besarnya pengangguran, hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tak mampu menampung tenaga mereka karena kurangnya faktor produksi lain untuk mengimbangnya sehingga terjadilah pengangguran itu.
 - f. Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, misalnya keuntungan lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu aja.
 - g. Tekanan penduduk yang berat, hal ini disebabkan antar lain naiknya rata-rata umur manusia dibarengi dengan masih besarnya persentase kenaikan jumlah penduduk yang makin lama makin membebani sumber daya lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - h. Penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah, hal ini disebabkan karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama, di samping itu kualitas alat-alat produksi, pupuk, teknik pengolahan juga masih relatif rendah.
5. Dukungan Pemerintah
- Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi Negara. Instrumen kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut:
- Kebijakan Langsung terhadap komoditi yang bersangkutan
- a. Kebijakan peradangan luar negeri terbagi atas 2 instrumen, yaitu instrumen tarif yang terdiri atas pajak impor, pajak ekspor, dan subsidi ekspor, serta instrumen non-tarif terbagi atas 2 pembatasan yaitu, pembatasan kuantitatif, berupa kuota impor dan kuota ekspor, serta pembatasan kualitatif, berupa syarat-syarat kesehatan , kualitas lingkungan dan karantina.

- b. Kebijakan perdagangan dalam negeri, terbagi atas;
 - Pajak penjualan, retribusi , dan kewajiban pembayaran lainnya
 - Pengaturan distribusi barang
 - Pengaturan harga
- c. Kebijakan produksi, terdiri atas:
 - Subsidi/pajak langsung bagi produsen
 - Perlindungan harga produksi dan sarana produksi
 - Pengaturan penggunaan sarana produksi

Kebijakan tidak langsung

Kebijakan makro, terdiri dari: over/under valuation, nilai tukar, pengaturan suku bunga dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditi lainnya.

Dampak dari proteksi perdagangan:

- a. Distorsi pasar adalah perbedaan antara harga yang berlaku dan harga yang seharusnya terjadi jika tidak ada kebijakan proteksi pemerintah (harga pasar bersaing bebas)
- b. Transfer pendapatan kepada konsumen maupun produsen

Hambatan di bidang Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah tercapai. Bagi Indonesia, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, yang juga akan berdampak pada aspek sosial dan politik. Beberapa penghambat pembangunan itu antara lain seperti yang berikut ini.

1. ***Iklim Tropis***, menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia dan membuat pertanian kurang menguntungkan.

2. **Produktivitas Rendah**, ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang relatif kurang menguntungkan.
3. **Kapital Sedikit**, ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah.
4. **Nilai Perdagangan Luar negeri Yang Rendah**, ini disebabkan negara miskin mengAMDALKan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis.
5. **Besarnya Pengangguran**, hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tak mampu menampung tenaga mereka karena kurangnya faktor produksi lain untuk mengimbangnya sehingga terjadilah pengangguran itu.
6. **Besarnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan**, misalnya keuntungan lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu saja.
7. **Tekanan Penduduk Yang Berat**, hal ini disebabkan antara lain naiknya rata-rata umur manusia dibarengi dengan masih besarnya persentase kenaikan jumlah penduduk yang makin lama makin membebani sumber daya lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
8. **Penggunaan Tanah Yang Produktivitasnya Rendah**, hal ini disebabkan karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama, disamping itu kualitas alat-alat produksi, pupuk, teknik pengolahan juga masih relatif rendah.

Masih ada kendala-kendala lain yang dapat menghambat pembangunan ekonomi, seperti kelemahan dalam faktor budaya dari masyarakat, ketidaksempurnaan pasar, mekanisme dalam rangka meningkatkan jumlah tabungan dalam negeri, kewiraswastaan dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Selain itu, sudah tentu dengan situasi dan kondisi kritis yang multidimensi yang masih terasa sampai saat ini.

C.5. Aspek Sosial

Suatu perusahaan dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya harus bekerja sama dengan komponen lain.

1. Perusahaan sebagai lembaga sosial

Tujuan perusahaan selain mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, ia juga hendaknya mengembangkan misi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting agar dirinya dengan masyarakat dapat hidup saling menguntungkan.

2. Perubahan kondisi sosial yang kompleks

Pemecatan karyawan karena berbagai alasan, hal ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial yang kompleks dalam perusahaan. untuk menghindari terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial yang kompleks yaitu dengan cara :

1. memperbaharui peraturan pemerintah
2. meningkatkan kualitas SDM
3. kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan
4. perkembangan pasar yang sudah harus dilayani oleh banyak perusahaan
5. adanya system social yang bersifat pluralistic dimana tugas-tugas social mulai ditangani oleh lembaga-lembaga yang besar

3. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistic

Masyarakat pluralistic adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan social, ekonomi dan politik. Dikaitkan dengan perusahaan, hubungan antara perusahaan dan lembaga-lembaga lingkungan adalah menjadi kompleks karena banyak lembaga yang terlibat. Oleh sebab itu, perusahaan berada dalam masyarakat pluralistic. Dalam masyarakat pluralistic ini dapat beberapa pusat kekuatan yang masing-masing mempunyai tingkay otonomi tertentu meskipun tidak berdiri sendiri.

C.6. Konsep Surplus Konsumen Dan Produsen

Penghematan yang dinikmati oleh konsumen karena adanya penurunan harga, disebut sebagai “**Surplus Konsumen**”. Surplus Konsumen dan Produsen ini adalah surplus Ekonomi yang berlaku pada tingkat produksi atau konsumsi sejumlah tertentu. Apabila terjadi penambahan produksi maka kurva penawaran akan bergeser kekanan, sehingga perpotongan kurva penawaran baru dengan kurva permintaan pada titik keseimbangan yang baru pula. Dengan pergeseran ini, maka **surplus konsumen** akan **bertambah**, dan **surplus produsen** akan **berkurang**.

C.7. Konsep Harga Bayangan (Shadow Price)

Analisa keuangan dalam perhitungan profitabilitas keuangan dengan menggunakan harga pasar yaitu harga yang berlaku dipasaran, sedangkan analisa ekonomi untuk menghitung profitabilitas ekonomi menggunakan harga ekonomi yaitu harga seandainya tidak terdapat distorsi pada pasar. Harga ekonomi disebut juga sebagai harga bayangan yang juga merupakan *opportunity cost* yang dihitung terhadap setiap input dan output dari bisnis atau proyek.

Produk (barang atau jasa) yang diperjual belikan dan digolongkan atas *tradeable* dan *non-tradeable*, artinya dapat diperdagangkan dipasaran dunia atau tidak dapat diperdagangkan. Produk tersebut dikatakan dapat diperdagangkan (*tradeable*) apabila memenuhi salah satu dari hal berikut ini;

1. produsen dalam negeri cukup efisien, sehingga tanpa distorsi pasar, dengan harga FOB yang lebih tinggi dari biaya produksinya memberikan rangsangan untuk mengekspor. Harga internasionalnya (*border price*) dinyatakan dalam satuan moneter setempat pada kurs pasar.
2. perbandingan biaya produksi dalam negeri dengan harga CIF (harga impornya) sedemikian rupa sehingga

menimbulkan permintaan akan impor barang / jasa tersebut.

Produk dikatakan sebagai tidak diperdagangkan (non-tradeable) apabila ;

1. permintaan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi domestik pada harga dibawah nilai CIF, atau dengan kata lain harga impornya (harga CIF) lebih besar daripada biaya produksi domestik sehingga tidak menguntungkan bila diimpor. Misalnya, harga impor dari tiang listrik beton sebesar \$1200,- sedangkan produsen di Indonesia dapat menawarkan pada haraga \$900,- maka tidak akan ada impor.
2. harga ekspor FOB terlalu rendah, berada dibawah biaya produksi domestik, sehingga tidak dapat merangsang ekspor. Misalkan, haraga tiang listrik beton di Singapura sebesar \$1400 tapi biaya transportasinya sebesar \$600, sehingga eksportir Indonesia hanya menerima \$800 (lebih kecil dari biaya produksi), maka tidak terjadi ekspor.

Harga FOB dan CIF merupakan *border price* dimana FOB adalah paritas ekspor dan CIF adalah paritas impor.

Harga Bayangan Dari Faktor Produksi

1. Faktor Produksi Modal, Investasi dari suatu usaha atau proyek yang dibiayai baik dengan modal sendiri, maupun dengan pinjaman, dari segi ekonomi masing-masing mempunyai biaya modal atau biaya pinjaman yang diperhitungkan dari *opportunity cost*.
2. *Opportunity cost*, dalam hal ini berarti dengan menginvestasikan sumber daya tersebut dalam suatu usaha/proyek tertentu, maka manfaat yang seharusnya diperoleh apabila digunakan dalam usaha/proyek yang lain, menjadi dikorbankan. Sumber daya yang dimaksud baik modal sendiri maupun pinjaman dari lembaga keuangan.

Dengan memperhitungkan tingkat inflasi, maka hubungan antara tingkat suku bunga riil dengan yang nominal adalah:

$$r = (i - f) : (i + f)$$

Keterangan :

r = tingkat suku bunga riil

f = tingkat inflasi

i = tingkat suku bunga nominal

Misalkan: untuk tingkat suku bunga nominal 21% dan tingkat inflasi 10%,
maka tingkat suku bunga riil-nya = 10%.

3. Faktor produksi tenaga kerja; harga bayangan dari upah tenaga kerja yang dipekerjakan pada suatu usaha / proyek bergantung pada asal tenaga kerja tersebut , yang merupakan salah satu dari kemungkinan yang berasal dari :
 - a. Tenaga kerja sektor lain; upah bayangannya adalah opportunity cost yaitu nilai produksi yang dikorbankan dalam kegiatan lain, atau seberapa besar yang bersedia dibayar sektor tersebut.
 - b. Tenaga kerja yang menganggur yang tidak berproduksi: Upah bayangannya adalah NOL.(karena tidak mempengaruhi tingkat produksi dan kegiatan lainnya pada jangka pendek).
 - c. Tenaga kerja impor luar negeri: upah bayangannya adalah jumlah yang dibayarkan ditambah dengan premium dalam bentuk devisa yang dikirimkan ke negara asalnya (*wage remittance*).
4. Valuta asing: Untuk negara berkembang, nilai tukar kurs valuta asing resmi biasanya jauh lebih rendah dari nilai tukar pasar / riil atau nilai tukar bayangan (*shadow exchange rate* = SER).
5. Nilai tukar bayangan (SER) merupakan suatu nilai tukar implisit, seperti satu dolar yang dinyatakan dalam rupiah

dan dapat menyimpang dari nilai tukar resmi. Nilai ini bergantung pada tingkat keseimbangan yang berlaku antara permintaan dan penawaran dalam pasar devisa.

Misalnya: suatu proyek pabrik tekstil direncanakan memproses 1 ton kapas tiap tahun yang diimpor dengan harga CIF sebesar \$1.00 per kilo. Bila SER adalah Rp 2500 per dollar dan nilai tukar resminya adalah Rp2325 per dollar, maka *opportunity cost* penggunaan kapas dalam proyek adalah $1000 \text{ kg} \times \$1.00 \times \text{Rp } 2500 = \text{Rp } 2.500.000,-$ per tahun yang merupakan arus biaya proyek .

C.8. Kriteria Investasi Tambahan

Dewasa ini hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan negara sedang berkembang berusaha untuk menarik penghasilan devisa, karenanya usaha mendorong terciptanya barang substitusi impor produk ekspor mendapat perhatian.

Dalam kaitan usaha ini, yakni proyek produk dalam perdagangan internasional (**tradeable goods**), dikenal dua kriteria investasi tambahan disamping kriteria investasi yang dibahas dalam aspek keuangan nanti, yaitu **Unit Domestic Resource Cost (UDRC)** dan **Effective Rate of Protection (ERP)**. Dengan kata lain, dua kriteria investasi ini hanya berlaku untuk proyek yang menghasilkan produk yang bersifat **tradeable**, yakni suatu jenis barang dan jasa yang :

1. Sekarang diimpor dan diekspor,
2. Bersifat pengganti yang erat hubungannya dengan jenis lain yang diimpor atau diekspor, dan
3. Jenis barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat (a) dan atau (b) tadi, karena adanya kebijaksanaan pihak pemerintah untuk menghindari diimpor atau diekspornya barang atau jasa tersebut.

Kriteria **UDRC** dan **ERP** ini bertitik tolak dari anggapan bahwa efisiensi tingkat produksi jenis barang dan jasa **tradeable** tergantung pada daya saing produk tersebut di pasaran dunia.

Daya saing ini ditunjukkan oleh perbandingan biaya produksi riil yang terdiri dari pemakaian sumber-sumber nasional (**real local input cost**) sehingga harga jualnya (setelah dipotong segala macam pajak) tidak melebihi **tingkat border price** yang relevan.

Berbagai cara telah dikembangkan untuk menghitung UDRC, namun yang cukup dikenal adalah cara BRUNO, sehingga sering disebut kriteria UDRC sebagai BRUNO RATIO.

Rumus perhitungan UDRC adalah sebagai berikut :

$$\text{DRC/satuan devisa} = \frac{\text{Biaya Dalam negeri (Rp)}}{\text{Nilai Output (\$) - Nilai Input Luar negeri (\$)}}$$

Nilai output - Nilai input luar negeri = Penghematan / penerimaan devisa yang diciptakan oleh proyek yang bersangkutan, dan jika dilihat secara keseluruhan rumus di atas menunjukkan berapa nilai rupiah yang harus dikorbankan (diinvestasikan) untuk menghemat atau menghasilkan satu satuan devisa, dalam hal ini dollar.

Hal yang dicatat untuk perhitungan biaya yang digunakan dalam proyek adalah jika input yang digunakan ini barang impor atau substitusi impor, maka digunakan harga CIF (Cost, Insurance, Freight) dan jika barang yang digunakan adalah barang yang selama ini diekspor digunakan harga FOB (Free on Board).

Ketentuan yang digunakan dalam penerimaan atau penolakan proyek dengan kriteria UDRC ini adalah membandingkan antara UDRC dengan nilai tukar resmi (*Official Exchange Rate* = OER) atau membandingkan dengan nilai tukar riil (*Shadow Exchange Rate* = SER), walau yang belakangan disebut lebih sering digunakan.

Secara sederhana adalah sebagai berikut :

UDRC < OER ----- proyek diterima
UDRC > OER ----- proyek ditolak, atau
UDRC < SER ----- proyek diterima
UDRC > SER ----- proyek ditolak, atau

Jika dinyatakan dalam rasio SER

$$\frac{\text{UDRC}}{\text{SER}} < 1 \longrightarrow \text{proyek diterima}$$

$$\frac{\text{UDRC}}{\text{SER}} > 1 \longrightarrow \text{proyek ditolak.}$$

Hal yang perlu dicatat adalah karena biasanya $\text{SER} > \text{OER}$, maka suatu proyek yang diterima karena perbandingannya dengan OER, maka pasti diterima jika dibandingkan dengan SER, tetapi tidak berarti penggunaan perbandingan OER lebih baik.

ERP atau tingkat produksi efektif berusaha melihat daya saing barang dalam negeri.

Rumusan ERP yang digunakan disini adalah :

$$\text{ERP} = \frac{\text{UDRC}}{\text{R}} - 1$$

$$\text{R} = \text{SER.}$$

Rumus di atas menyerupai kriteria penerimaan / penolakan proyek pada perhitungan UDRC yang dinyatakan dengan rasio,

karenanya kriteria penolakan / penerimaan dari ERP ini adalah sebagai berikut :

Jika ERP positif $\longrightarrow$ Proyek di tolak.
ERP negatif atau Nol $\longrightarrow$ Proyek di terima.

Kalau diingat telah banyak kriteria investasi yang lain, tetapi kriteria investasi UDRC dan ERP juga perlu dipelajari, hal ini menunjukkan pada adanya beberapa kelebihan yang ada pada kriteria ini.

Pertama, kriteria ini secara eksplisit memerlukan data Border Price dan Shadow Price dalam Exchange Rate, karenanyakriteria ini berusaha menggambarkan *riil cost* dan *riil revenue*.

Kedua, keputusan feasibilitas yang diambil oleh kedua kriteria ini terhadap suatu proyek tertentu sama, jika satu proyek dinyatakan feasible oleh UDRC, maka akan dinyatakan feasible pula oleh ERP, demikian pula sebaliknya. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kriteria ini mempunyai hubungan satu sama lainnya, yakni jika UDRC = SER, maka ERP = 0, jika UDRC lebih besar dari pada SER, maka ERP lebih besar dari Nol dan sebaliknya.

Ketiga, dengan menggunakan kriteria ERP, mungkin kita dapat mengetahui secara persis daya saing proyek kita di pasar internasional, dan dari-padanya dapat digunakan $\longrightarrow$ dasar pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut.

Disamping beberapa kebaikan tersebut, kedua kriteria ini juga memiliki kelemahan yaitu; *Pertama*, kedua alat ini hanya dapat digunakan untuk proyek yang menghasilkan *produk tradeable*. *Kedua*, sukarnya mendapatkan data *shadow price*. *Ketiga*, biasanya alat ini lebih cenderung digunakan untuk menilai *tingkat efisiensi proyek-proyek yang telah berjalan*.

Dari keseluruhan aspek ekonomi yang telah dilakukan ini, harga bayangan (*shadow price*) yang digunakan adalah harga bayangan efisiensi. Hal ini terjadi karena pengukuran

feasibilitas aspek ekonomi dinyatakan dalam efek pertumbuhan, dengan tidak memperhatikan efek pemerataan (distributif). Jadi, dalam pendekatan ini hanya proyek-proyek yang memberikan sumbangan kepada maksimisasi pendapatan nasional yang dianggap feasible. Praktik penilaian proyek seperti ini sering disebut praktik tradisional, walau baru pada tataran ini yang telah tersusun kerangka teori dan konstruksinya secara jelas.

Pada dasawarsa belakangan ini sudah sering dinyatakan bahwa penilaian proyek tidak lagi sekedar menitikberatkan pada efek pertumbuhan yang tercermin dalam maksimisasi pendapatan nasional, tetapi hendaknya juga memperhatikan efek distributifnya yakni apakah efek ini mendukung investasi berikutnya atau efek konsumtif, demikian pula untuk orang kaya atau untuk orang miskin.

Demikian pula, perlu diperhatikan efek proyek terhadap kerugian (biaya) dan manfaat sosial lainnya, terutama dalam kaitannya dengan budaya masyarakat setempat.

Jika efek distributif itu diperhatikan dan selayaknya memang demikian, maka shadow price yang digunakan adalah harga-harga sosial (social service). Nampaknya pendekatan yang kedua ini semakin banyak mendapatkan perhatian, bahkan World Bank sendiri telah mulai menjalankan praktik ini. Tugas yang cukup berat nampaknya adalah membangun kerangka teori yang cukup memadai untuk pendekatan kedua ini, karena kerangka teori untuk pendekatan kedua ini belum jelas benar.

D. RANGKUMAN

1. Dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah adalah adakah manfaat yang akan diperoleh baik secara ekonomi maupun sosial bagi berbagai pihak atau sebaliknya
2. *Analisa Keuangan* menitik beratkan pada pendekatan mikro, hanya membatasi pada manfaat dan pengorbanan dari segi perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha tersebut

3. *Analisa Ekonomi* menitik beratkan pada pendekatan makro, dengan melihat kegiatan usaha dari segi perekonomian secara keseluruhan dengan mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan suatu kegiatan usaha terhadap masyarakat umumnya.

E. LATIHAN

1. Jelaskan manfaat dari analisis ekonomi dan sosial dalam sebuah studi kelayakan bisnis?
2. Jelaskan pentingnya analisis ekonomi dan sosial bagi stakeholder dalam sebuah studi kelayakan bisnis?
3. Jelaskan perbedaan antara analisis ekonomi dan analisis keuangan?
4. Apa saja kriteria investasi tambahan dalam analisis ekonomi dan sosial?
5. Apa yang dimaksud dengan border price dan shadow price? Jelaskan penerapannya dalam penyusunan studi kelayakan bisnis!

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Husnan, Suad dan Suwarsono, (2008). *Studi Kelayakan Proyek*, Edisi Keempat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
2. Kasmir dan Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. (edisi revisi). Kencana, Jakarta
3. Rangkuti, F. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
4. Tandelilin, Eduardus, (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanius: Yogyakarta
5. Umar, Husein. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis* edisi 3. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta